



#BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



2023

**Biro Rekrutmen Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN
KAPASITAS HAKIM
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepantasnya selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) dapat melaksanakan tugas dan mencapai segala target kinerja dengan baik dan lancar.

Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (selanjutnya disingkat BRAP) dalam melaksanakan tugas-tugasnya hanya didukung 27 (dua puluh tujuh) orang diantaranya adalah 26 (dua puluh enam) orang ASN (25 PNS dan 1 PPPK yang diperbantukan sebagai sekretaris pimpinan) dan 1 (satu) orang tenaga administrasi kontrak. Keterbatasan sumber daya yang ada tidak mengurangi semangat para pegawai mendukung pelaksanaan tugas BRAP dalam menuntaskan target-target kinerja yang telah ditentukan. Tidak jarang kendala dan hambatan pun terjadi sehingga perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah disusun. Disamping itu, dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Yudisial juga turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja BRAP.

Pada tahun 2023, BRAP terus berupaya melakukan sinergi dengan membangun kolaborasi interunit serta secara eksternal dengan stakeholder utama diantaranya Mahkamah Agung, DPR, aparat penegak hukum dan perguruan tinggi. Hal ini membuat pelaksanaan tugas BRAP menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim serta menjalankan fungsinya meningkatkan integritas hakim. Disamping itu, dukungan internal Kesetjeraan Komisi Yudisial terkait sarana dan prasarana virtual, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BRAP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk unit BRAP Tahun 2023 merupakan sebuah upaya transparansi serta akuntabilitas juga bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, menjadi bahan refleksi bagi kinerja, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi BRAP.

Akhir kata sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, *'tak ada gading yang tak retak'*. BRAP masih memerlukan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar segala kekurangan dan hambatan yang terjadi di 2023 dapat terkoreksi dan menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 15 Januari 2024
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Untung Maha Gunadi
NIP 19710422 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Visi, Misi dan Tujuan Brap	5
B. Penetapan Kinerja Tahun 2023	6
C. Rencana Kerja Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	9
A. Kontribusi Dalam Pencapaian Sasaran Program dan Strategis Lembaga	9
B. Capaian Kinerja	11
1) Sasaran Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung yang Andal	12
2) Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)	18
3) Sasaran Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	25
C. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama BRAP Tahun 2023	2
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, dan Sasaran BRAP 2020 – 2024	5
Tabel 2.2.	Relasi Antar Indikator Kinerja Tahun 2023	6
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	7
Tabel 2.4.	Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	8
Tabel 3.1.	Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023	9
Tabel 3.2.	Pengukuran Kontribusi Capaian Indikator BRAP pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023	10
Tabel 3.3.	Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Indikator Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023	11
Tabel 3.4.	Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM pada Setiap Tahapan	13
Tabel 3.5.	CHA yang Disetujui oleh DPR Periode 2022/2023	13
Tabel 3.6.	Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM TA 2023 pada Setiap Tahapan	14
Tabel 3.7.	CHA dan Ad hoc HAM yang Diusulkan ke DPR Periode 2023	15
Tabel 3.8.	Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023	16
Tabel 3.9.	Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2022	17
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2020 sampai dengan 2023	17
Tabel 3.11.	Capaian Target Kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Dugaan PMKH) Tahun 2023	19
Tabel 3.12.	Pengukuran Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2023	22
Tabel 3.13.	Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2022	23
Tabel 3.14.	Perbandingan Capaian Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH) Tahun 2020 sampai dengan 2023	23
Tabel 3.15.	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023	25
Tabel 3.16.	Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2023	27
Tabel 3.17.	Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2023	30

Tabel 3.18.	Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2022	31
Tabel 3.19.	Hasil Pengolahan Survei Dampak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023	32
Tabel 3.20.	Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 sdamaoi dengan Tahun 2023	33
Tabel 3.21	Tabel Realisasi Anggaran Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023	34
Tabel 4.1.	Tabel Simpulan Capaian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Rrekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	1
Gambar 3.1.	Pelaksanaan Wawancara Terbuka Seleksi CHA dan CH Adhoc di MA periode 2022/2023 di Komisi Yudisial	12
Gambar 3.2.	Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial	19
Gambar 3.3.	Peningkatan Kapasitas Hakim (Pelatihan Eksplorasi KEPPH) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial	25

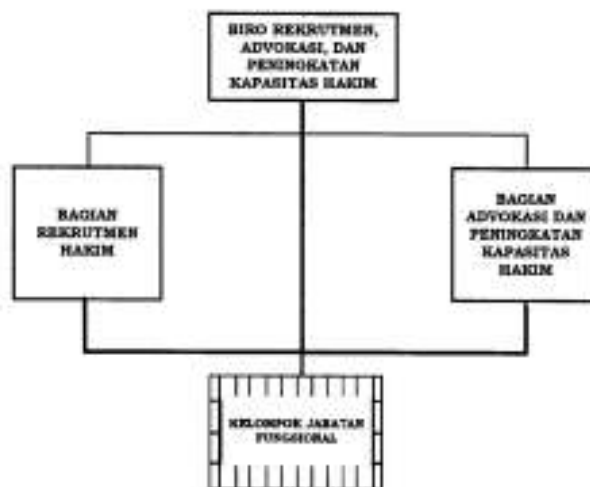
BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (*selanjutnya disingkat BRAP*) ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran. LAKIP ini juga disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Tahun 2023 BRAP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.18.664.584.000,- (delapan belas milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat juta rupiah). Pada Tahun 2023, terdapat dua kegiatan yang diampu oleh BRAP yang masuk ke dalam Program Prioritas Nasional yaitu, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan serta Advokasi dan Klinik Etik. Disamping Program Prioritas Nasional, BRAP juga mengampu Program Prioritas Lembaga yaitu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung. Pada tahun 2023 sebagian besar kegiatan sudah dilakukan secara tatap muka namun dalam prosesnya tetap menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia.

BRAP menopang Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, secara struktur organisasi, BRAP terbagi dalam 2 (dua) bagian serta didukung oleh kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Selanjutnya, berkaitan dengan isu strategis, akan diuraikan sesuai dengan 3 (tiga) fungsi yang ada di BRAP, yaitu Rekrutmen Hakim, Advokasi Hakim dan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim serta akan diuraikan pula mengenai aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi. Aspek strategis yang dimaksud dalam hal ini adalah hal-hal yang secara strategis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan dan secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pada unit kerja eselon II pada BRAP. Sementara permasalahan utama dalam hal ini diartikan sebagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja. Adapun hal-hal yang menjadi aspek strategis dan permasalahan utama pada unit kerja eselon II BRAP dijabarkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama BRAP Tahun 2023
(sesuai dengan rumusan rapat kerja Komisi Yudisial pada 14-16 Februari 2023)

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
1	Rekrutmen Hakim	Penyiapan Assessment Center Calon Hakim Agung dan <i>Ad hoc</i>	Kepindahan Komisi Yudisial ke Ibu Kota Negara yang baru membutuhkan persiapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Assessment Center untuk keperluan seleksi calon hakim agung dan <i>ad hoc</i> .
		Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan <i>ad hoc</i> di MA.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya perhitungan kebutuhan formasi hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di MA yang disepakati oleh KY dan MA 2) Permintaan MA terkait calon hakim agung dan <i>ad hoc</i> di MA belum terpenuhi disebabkan jumlah calon yang memenuhi standar kelayakan KY belum 100% dan calon yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR. Namun sejauh ini jumlah calon yang diusulkan masih memenuhi target yang ditetapkan Komisi Yudisial. 3) Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung TUN khusus pajak belum menyentuh asosiasi profesi konsultan atau pengacara peradilan pajak secara luas. 4) Hasil Seleksi calon hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di MA belum diolah lebih lanjut menjadi rekomendasi pengembangan hakim karir untuk MA.

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
2	Advokasi Hakim	Efektivitas pencapaian kinerja advokasi hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kuantitas sumber daya manusia yang minim sangat berpengaruh terhadap percepatan pencapaian kinerja advokasi hakim. Saat ini tercatat hanya ada 5 (lima) orang staf pelaksana pada Subbagian Adokasi. Dengan banyaknya kegiatan serta cakupan wilayah kerja se-nusantara, tentu saja jumlah 5 (lima) orang staf pelaksana sangatlah tidak cukup. 2) Masih minimnya pengetahuan hakim tentang fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, sehingga masih minimnya laporan yang masuk mengenai dugaan PMKH yang berasal dari hakim langsung.
		Penerapan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan teknis tentang pelaksanaan penanganan laporan/informasi dalam rangka mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap pelaku PMKH ini sudah tidak dapat diaplikasikan di lapangan sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan. 2) Proses bisnis dan alur penanganan laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu dilakukan penyederhanaan. 3) Indikator-indikator yang termasuk ke dalam 3 (tiga) dimensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim belum tercantum dalam peraturan. 4) Saat ini draft rancangan perubahan Peraturan KY tentang Advokasi telah diusulkan ke Subbagian Hukum dan Organisasi untuk ditindaklanjuti.
		Adanya Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan	Perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh Komisi Yudisial dalam rangka mendukung peraturan mengenai sistem keamanan pengadilan ini bisa diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
3	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	Partisipasi aktif mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan mafia tanah, peningkatan kualitas penanganan perkara pada sengketa pajak dan sengketa pemilu, melalui penyelenggaraan pelatihan tematik dengan materi berdasarkan data tren laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial. Sehingga prioritas pelatihan tematik untuk tahun 2023 adalah mafia tanah, pajak, dan pemilu.	1) Belum ada Desain pencegahan 2) Belum dirumuskannya desain peningkatan kapasitas hakim yang berkelanjutan 3) Usulan peserta hakim tidak sesuai dengan permintaan KY dan belum adanya integrasi data hakim yang dilatih Komisi Yudisial dan MA
		Perbaikan mekanisme dan tata laksana kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Perubahan pola kerja pasca adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 indidusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) antara lain adalah:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategi (Rensta) 2020-2024;
2. Sebagai bahan evaluasi dan bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam renstranya mengukuhkan peran fungsinya melalui visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Biro yang reponsif, kredibel, dan unggul dalam menjalankan tugas pokok penguatan kapasitas hakim”

Berangkat dari visi diatas dirumuskan bahwa arah dari misi BRAP dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: “Peningkatan Kapasitas Hakim Sesuai Dengan Standar KEPPH”. Dari misi tersebut BRAP merumuskan tujuan “Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH”. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran BRAP tergambar dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran BRAP 2020 – 2024

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan kapasitas hakim sesuai dengan standar KEPPH	Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH dari 40% di Tahun 2020 menjadi 60% di Tahun 2024	Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung (CHA) dan calon <i>ad hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau calon hakim <i>ad hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan mencapai 70% di tahun 2024
			Terlaksananya layanan advokasi hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100% setiap tahun sampai dengan 2024
			Meningkatnya kapasitas dan etika hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai 35% di Tahun 2024
				Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH mencapai 95% di Tahun 2024

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 maka indikator kinerja BRAP Tahun 2023 merupakan turunan dari sasaran strategis Komisi Yudisial yaitu 'Meningkatnya Integritas Hakim' dan sasaran program 'Memperkuat Kapasitas Hakim' dengan indikator sasaran program yaitu persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 55% pada Tahun 2023. Penjabaran indikator kinerja dari level lembaga sampai dengan lingkup unit eselon II tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

Tabel 2.2. Relasi Antar Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis KY	IKU KY	Sasaran Strategis Setjen	IKU Setjen	Sasaran Kegiatan BRAP	IKK BRAP
Meningkatnya integritas hakim	Skor Indeks Integritas Hakim sebesar 7,68	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 55%	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 65%
				Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 30% 2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 90%
				Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, indikator kinerja pada masing-masing tingkatan unit organisasi telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon II, Eselon I dan juga Lembaga. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta kontribusi pencapaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sasaran Program dan Sasaran

Strategis.

Pada Tahun 2023, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 2.3. berikut. Terdapat 3 sasaran kegiatan yang sumber datanya diampu oleh unit terkait di lingkungan Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	65%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	30%
		2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	90%

C. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahun 2023
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			ALOKASI 2023 (RP RIBU)
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	
01	Terseleenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA yang andal				4.780.000,0
01.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		Orang		4.780.000,0
01.ADG.001	Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	1	Orang		452.010,0
01.ADG.001.051	Penyusunan bank soal seleksi dan kepribadian berbasis kompetensi	1,0	Orang/Dokumen	452.010,0	452.010,0
01.ADG.003	Laporan hasil Seleksi Administrasi	1	Orang		638.150,0
01.ADG.003.051	Pengumuman dan penerimaan pendaftaran	1,0	Orang/Laporan	569.408,0	569.408,0
01.ADG.003.052	Verifikasi berkas pendaftaran	1,0	Orang/Laporan	68.742,0	68.742,0
01.ADG.U04	Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	40	Orang		3.689.840,0
01.ADG.U04.051	Pelaksanaan Seleksi Kualitas	1,0	Orang/Laporan	113.920,0	113.920,0
01.ADG.U04.052	Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	40,0	Orang	69.998,0	2.799.920,0
01.ADG.U04.053	Pelaksanaan wawancara	1,0	Orang/Laporan	776.000,0	776.000,0
03	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim				8.520.020,0
03.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		Orang		320.020,0
03.ADG.002	Talent Pool Calon Hakim Agung	100	Orang		320.020,0
03.ADG.002.051	Pelaksanaan Talent Mapping	1,0	Orang	320.020,0	320.020,0
03.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM		Orang		8.200.000,0
03.PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	600	Orang		8.200.000,0
03.PDG.001.051	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	600,0	Orang	11.353,3	6.811.964,0
03.PDG.001.052	Pengukuran keberhasilan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	1,0	Laporan	926.354,0	926.354,0
03.PDG.001.053	Penyusunan dan pengembangan instrumen pembelajaran (kurikulum, modul, bahan ajar,)	3,0	Laporan	153.894,0	461.682,0
04	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim				5.364.564,0
04.PEA	Koordinasi		kegiatan		5.364.564,0
04.PEA.001	Advokasi Hakim dan Klinik Etik	32	kegiatan		5.364.564,0
04.PEA.001.051	Advokasi Hakim	20,0	Laporan	155.728,2	3.114.564,0
04.PEA.001.052	Klinik Etik Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	8,0	Kegiatan	262.500,0	2.100.000,0
04.PEA.001.053	Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro BRAP	4,0	Laporan	37.500,0	150.000,0
Total					18.664.584,0

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

1) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial, capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program “Memperkuat Kapasitas Hakim” dengan indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”. Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim *ad hoc* di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau *Ad hoc* di MA yang dibuka dalam proses seleksi. Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Tabel 3.1. Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
1.	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	55%	a. (Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / Jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100% b. (Jumlah CHA dan/atau <i>Ad hoc</i> di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau <i>ad hoc</i> di MA yang dibuka) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH sejak 2012 s.d. 2023. 2. Jumlah hakim di seluruh Indonesia pada tahun 2023 3. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau <i>ad hoc</i> di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi. 4. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau <i>Ad hoc</i> di MA yang dibuka pada surat terkait permintaan atau formasi CHA dan/atau <i>Ad hoc</i> yang dibuka.

Kemudian jika dilihat dari capaian kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2023, pengukuran kontribusi di atas dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. **Adapun secara lebih rinci capaian-**

capaian kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2023 akan diurai pada subbab selanjutnya.

Tabel 3.2. Pengukuran Kontribusi Capaian Indikator BRAP pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023 “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”

Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Capaian Target
<p>(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100%</p> $\frac{3.742}{8.391^*} \times 100\% = 44,59\%$ <p><i>* menggunakan angka jumlah hakim terbaru (peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7.943)</i></p>	<p>(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100%</p> $\frac{20}{27} \times 100\% = 74,07\%$	<p>Formulasi Hitung (a)+(b) 2 X 100%</p> $\frac{44,59\%+74,07\%}{2} \times 100\% = \mathbf{59,33\%}$
Target 2023: 55%	Kontribusi BRAP pada Target : 59,33%	Persentase Kontribusi pada Target: 107,87%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian BRAP berkontribusi pada penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” sebesar 59,33% yang memiliki target 55%. Dengan kata lain, pemenuhan capaian kinerja BRAP telah berkontribusi sebesar 107,87% (melebihi target) untuk target tahun 2023.

2) Kontribusi dalam Indikator Kinerja Lembaga Komisi Yudisial

Capaian kinerja pada BRAP juga berkontribusi pada Sasaran Strategis Komisi Yudisial yaitu “Meningkatnya Integritas Hakim” dengan indikator “Indeks Integritas Hakim” yang salah satu indikatornya berasal dari BRAP yaitu “Memperkuat Kapasitas Hakim”.¹ Indikator tersebut dihitung berdasarkan sumber data dari BRAP yaitu:

1. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim;
2. Persentase CHA/Ad hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan; dan
3. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia.

¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Yudisial Tahun 2022

Tabel 3.3. Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Indikator Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	7,68	Internal:	
				1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi 2. Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani 3. Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
				2. Memperkuat Kapasitas Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim 2. Persentase CHA/Ad hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan 3. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia
				3. Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar	Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar
				Eksternal:	
				Hasil survei pengukuran integritas hakim	Skor hasil survey pengukuran integritas hakim

Keterangan: Sumber data yang dibalkan adalah kontribusi BRAP

B. CAPAIAN KINERJA

Dalam bahasan ini, akan diuraikan capaian kinerja sesuai dengan 3 (tiga) fungsi yang ada di BRAP, yaitu Rekrutmen Hakim, Advokasi Hakim dan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim.

1) Sasaran Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang Andal

a) Capaian Kinerja

Seleksi CHA dan Cakim *Ad hoc* di MA yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2023 merupakan kelanjutan dari Seleksi CHA dan Cakim *Ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di MA Tahun 2022/2023 yang telah berlangsung sejak Bulan Agustus 2022. Sampai dengan Desember 2022 seleksi yang berjalan sampai dengan tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian yaitu pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian dan kompetensi. Sementara itu klarifikasi rekam jejak baru dapat dilaksanakan pada Bulan Januari 2023.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Wawancara Terbuka Seleksi CHA dan CH Adhoc di MA periode 2022/2023 di Komisi Yudisial

CHA dan Cakim *Ad hoc* di MA yang lulus tersebut kemudian mengikuti Wawancara terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2023. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dimana panelis dan peserta hadir Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, pakar hukum dan negarawan. Berdasarkan hasil wawancara serta dengan mempertimbangkan penilaian pada keseluruhan tahapan seleksi, pleno Komisi Yudisial pada tanggal 2 Februari 2022 memutuskan kelulusan 6 (enam) CHA dan 3 (tiga) Cakim *ad hoc* di MA untuk diajukan ke DPR. CHA dan Cakim *ad hoc* di MA tersebut terdiri dari: 2 (dua) orang dari kamar pidana, 1 (satu) orang dari kamar perdata, 1 (satu) orang dari kamar agama, 1 (satu) orang dari kamar tata usaha negara, 1 (satu) orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak dan 3 orang calon hakim *ad hoc* HAM. Sejumlah calon tersebut diusulkan ke DPR untuk mengisi kekosongan 11 Hakim Agung dan 3 Hakim *ad hoc* HAM di MA.

Tabel 3.4. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM pada Setiap Tahapan

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	98	15	113	31 Agustus - 3 Oktober 2022
2.	Seleksi Kualitas	88	10	98	17 – 18 Oktober 2022
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian a. Pemeriksaan kesehatan b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi c. Klarifikasi Rekam Jejak	29	6	35	22 – 23 November 2022 29 November – 3 Desember 2022 2 – 25 Januari 2023
4.	Wawancara Terbuka	12	5	17	31 Januari – 2 Februari 2023
5.	Pengusulan ke DPR	6	3	9	3 Februari 2023

Berdasarkan usulan KY, DPR kemudian melakukan *fit and proper test* terhadap CHA dan Cakim Ad hoc HAM pada tanggal 27-28 Maret 2023. DPR melalui Komisi III kemudian memutuskan 3 (tiga) CHA disetujui untuk diangkat sebagai Hakim Agung. Ketiga CHA tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5. CHA yang Disetujui oleh DPR Periode 2022/2023

No.	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA	Perdata
2.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA	TUN
3.	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Agama

Pada tanggal 5 April 2023 Komisi Yudisial menerima surat permohonan pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM pada Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 dan 2/WKMA.Y/IV/2023 dibutuhkan hakim agung sebanyak 10 (sepuluh) orang dan hakim *ad hoc* hak asasi manusia sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kamar Perdata 1 (satu) orang berasal dari hakim karir
- 2) Kamar Pidana 8 (delapan) orang berasal dari hakim karir
- 3) Kamar TUN Khusus Pajak 1 (satu) orang berasal dari karir/umum
- 4) *Ad hoc* HAM 3 (tiga) orang

Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA ditutup pada tanggal 7 Juni 2023. Berdasarkan hasil pleno kelulusan seleksi administrasi pada 9 Juni 2023, dari 70 (tujuh puluh) Calon Hakim Agung dan 30 (tiga puluh) Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA yang menyelesaikan pendaftaran, diperoleh 63 (enam puluh tiga) Calon Hakim Agung dan 21 (dua puluh satu) Calon

Hakim *Ad hoc* HAM di MA yang lolos seleksi administrasi dan dapat mengikuti seleksi kualitas yang merupakan salah satu tahapan uji kelayakan.

Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan *Ad hoc* HAM di MA Tahun 2023 dilaksanakan di Hotel Holiday Inn, Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Juni 2023. Seleksi diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) Calon Hakim Agung yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) CHA kamar pidana, 8 (delapan) CHA kamar perdata dan 7 (tujuh) CHA kamar TUN khusus pajak) dan 17 (tujuh belas) Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA. Seleksi Kualitas meliputi Penilaian Karya Profesi (khusus CHA), Karya Tulis di tempat, Studi Kasus Hukum, Studi Kasus KEPPH dan Tes Objektif. Pengerjaan tes dilakukan menggunakan laptop yang disediakan panitia. Periode penilaian Seleksi Kualitas berlangsung sejak tanggal 26 Juni s.d 12 Juli 2023.

Berdasarkan hasil pleno kelulusan seleksi kualitas pada 13 Juli 2023, dari 63 (enam puluh tiga) Calon Hakim Agung dan 21 (dua puluh satu) Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA yang lolos seleksi administrasi, diperoleh 34 (tiga puluh empat) Calon Hakim Agung dan 6 (enam) Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA yang lolos seleksi kualitas dan dapat mengikuti seleksi Kesehatan dan kepribadian.

Akumulasi antara hasil pemeriksaan Kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi serta hasil klarifikasi sebagai tahap 3 dari proses seleksi CHA diumumkan pada 9 Oktober 2023. Dari 6 calon hakim *ad hoc* HAM yang mengikuti tahapan seleksi Kesehatan dan Kepribadian, satu calon hakim *ad hoc* HAM mengundurkan diri sebelum dilaksanakan klarifikasi rekam jejak dikarenakan lulus sebagai hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Pertama.

Tabel 3.6. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim *Ad hoc* HAM TA 2023 pada Setiap Tahapan

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim <i>Ad hoc</i> HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	63	21	84	8-29 Mei 2023
2.	Seleksi Kualitas	34	6	40	21-22 Juni 2023
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian a. Pemeriksaan Kesehatan b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi c. Klarifikasi Rekam Jejak	34	6	40	9-10 Agustus 2023 21-28 Agustus 2023 11 September – 4 Oktober 2023
4.	Wawancara Terbuka	15	5	20	16 – 19 Oktober 2023
5.	Pengusulan ke DPR	8	3	11	20 Oktober 2023

Selanjutnya 15 (lima belas) CHA dan 5 (lima) calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap wawancara terbuka yang diselenggarakan pada

tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2023. Pleno kelulusan seleksi dilakukan segera setelah wawancara berakhir di 19 Oktober tersebut. Selanjutnya pada 20 Oktober Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR 8 (delapan) CHA yang terdiri dari 6 (enam) CHA Kamar Pidana, 1 (satu) CHA Kamar Perdata, 1 (satu) CHA Kamar TUN khusus Pajak serta 3 (tiga) CH Ad Hoc HAM di MA.

Berdasarkan usulan KY, DPR kemudian melakukan *fit and proper test* terhadap CHA dan Cakim *Ad hoc* HAM pada tanggal 22-23 November 2023. DPR melalui Komisi III kemudian memutuskan 7 (tujuh) CHA disetujui untuk diangkat sebagai Hakim Agung. Ketujuh CHA tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. CHA dan Ad hoc HAM yang Diusulkan ke DPR Periode 2023

No.	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi Mataram	Pidana
2.	Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Pidana
3.	Noor Edi Yono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Pidana
4.	Sigid Triyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Pidana
5.	Sutarjo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Pidana
6.	Dr. Yanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana MA RI	Pidana
7.	Agus Subroto, S.H., M.Kn.	Panitera Muda Perdata Khusus MA RI	Perdata

b) Pengukuran Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja di atas, maka secara garis besar capaian target kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung berdasarkan Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.		
Indikator Kinerja : Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.		
VARIABEL UKUR	JUMLAH	PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Formasi calon hakim agung tahun 2023	27 (dua puluh tujuh)	Rumus Hitung: Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2023
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan tahun 2023	20 (dua puluh)	$\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2023}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023}} \times 100\%$ Capaian: $\frac{20}{27} \times 100\% = 74,07\%$
Target 2023: 65%	Capaian 2023: 74,07%	Persentase Realisasi Target: 114%

Dari 27 (dua puluh tujuh) calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung pada tahun 2023, Komisi Yudisial hanya dapat memenuhi sebanyak 20 (dua puluh) calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan atau hanya sebesar 74,07%. Meski tidak memenuhi 100%, namun capaian tersebut melampaui target kinerja yang menargetkan hanya sebesar 65% pemenuhan formasi. Sehingga artinya Komisi Yudisial melebihi target yakni 114%.

Jika kemudian dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja tahun ini hasil akhirnya sedikit lebih kecil. Namun tetap melebihi target kinerja.

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2022

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.		
Indikator Kinerja : Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.		
VARIABEL UKUR	JUMLAH	PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Formasi calon hakim agung tahun 2022	11 (sebelas)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2022}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2022}} \times 100\%$
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan tahun 2022	11 (sebelas)	Capaian: $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$
Target 2022: 60%	Capaian 2022: 100%	Persentase Realisasi Target: 166%

Sehingga kesimpulannya adalah bahwa beberapa tahun terakhir, capaian kinerja dari Sasaran Kinerja 1 : **Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang Andal selalu melebihi target kinerja.** Perbandingannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2020 sampai dengan 2023

Target 2020: 50%	Capaian 2020: 77,8%	Persentase Realisasi Target: 155,6%
Target 2021: 55%	Capaian 2021: 84,61%	Persentase Realisasi Target: 153,8%
Target 2022: 60%	Capaian 2022: 100%	Persentase Realisasi Target: 166%
Target 2023: 65%	Capaian 2023: 74,07%	Persentase Realisasi Target: 114%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam keberhasilan pencapaian kinerja yang melebihi target di atas, terdapat beberapa strategi yang diterapkan diantaranya adalah:

1. Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim

agung yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;

2. Kolaborasi dengan unit di kesekretariatjenderalan Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung. Diantaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon.

2) Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)

a) Capaian Kinerja

Dari waktu ke waktu, independensi hakim masih banyak mengalami gangguan, tidak hanya berasal dari faktor internal diri hakim sendiri (persoalan integritas), melainkan juga berasal dari faktor eksternal yang berkaitan gangguan non teknis. Misalnya ancaman keamanan dan terror, hingga kekerasan fisik terhadap hakim.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e UUKY, maka Komisi Yudisial melakukan tugas advokasi hakim. Advokasi hakim ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sesuai dengan marwahnya. Juga mendukung perwujudan peradilan yang agung dan berwibawa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Realisasi capaian sasaran kegiatan meningkatnya layanan advokasi hakim dengan indikator “Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” adalah dari target 100% dapat terealisasi 100%. Realisasi target Tahun 2023 tersebut sama dengan realisasi target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Renstra Komisi Yudisial 2020-2024. Dengan demikian BRAP telah berhasil mempertahankan pencapaian target dari tahun ke tahun.



Gambar 3.2. Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial

Pada tahun 2023 ini, Komisi Yudisial telah menyelesaikan kegiatan penanganan peristiwa dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik periode bulan Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **21 (dua puluh satu)** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Target Kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Dugaan PMKH) Tahun 2023

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
1	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa sabotase putusan dengan melakukan perubahan putusan yang di upload dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.	Media Online: lampungpro.co radarcom.id lampung.antarane ws.com	Belum diketahui	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dalam persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya	Media Online (cnnindonesia.com; detik.com)	Anggota Brimob yang mengamankan Persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya	Pengadilan Negeri Surabaya
3	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum Penggugat di dalam ruang sidang	Media Online (pedulibangsa.co.id; bwi24jam.co.id)	Pihak Tergugat	Pengadilan Agama Banyuwangi

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
4	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mencaci-maki, pencemaran nama baik, pengancaman bahkan pengrusakan fasilitas	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Aceh	Potensial dilakukan oleh Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Jantho
5	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa demonstrasi berlebihan; permintaan dari KPN untuk dilakukan koordinasi pengamanan persidangan a quo	KPN Singaraja, Heriyanti, SH., M. Hum.	massa pendukung dari masing-masing pihak berperkara	Pengadilan Negeri Singaraja
6	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan demonstrasi di PN Pati yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Jateng	Warga masyarakat yang pro dengan terdakwa maupun warga yang kontra dengan terdakwa	Pengadilan Negeri Pati
7	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim diluar persidangan dan menghina hakim dan pengadilan dengan melontarkan kata-kata dengan nada yang keras dan menyudutkan hakim wanita.	Jejaring PKY Jateng	LSM GJL (Gerak Jalan Lurus)	Pengadilan Negeri Pati
8	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang oleh Pengunjung Sidang	Media Online	Oknum pengacara inisial ER	Pengadilan Negeri Selong
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa pengrusakan mobil dinas Ketua PN Merauke	Media Online (papua60detik.id)	Belum diketahui	Pengadilan Negeri Merauke
10	Adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penyampaian verbal dan menghina majelis hakim pada ruang sidang dalam kategori mengganggu ketertiban dan proses persidangan serta diluar persidangan dengan menyebarkan hatespeech pada media sosial.	Ketua Pengadilan Negeri Samarinda	Oknum inisial HS	Pengadilan Negeri Samarinda
11	Adanya dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Militer Jayapura berupa	Letkol Laut (KH) Slamet Widada, S.H, M.H. selaku	Belum diketahui	Pengadilan Militer III-19 Jayapura

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	pencatutan nama dalam melakukan peminjaman sejumlah uang.	Wakil Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura		
12	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dengan membawa senjata api berupa pistol dan laras panjang di gedung pengadilan	Informan melalui Ketua Bidang Advokasi	Oknum Kepolisian inisial RS	Pengadilan Negeri Putussibau
13	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim berupa berbuat onar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kudus.	Jejaring PKY Jawa Tengah	Penggugat inisial BAM	Pengadilan Negeri Kudus
14	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang dan ancaman keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan	Media Online (Youtube dll)	Massa pendukung Korban	Pengadilan Negeri Mojokerto
15	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan atas peristiwa pelemparan batu dan ancaman teror terhadap Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Watampone	Media online (detikSulsel)	Orang tidak dikenal	Pengadilan Negeri Watampone
16	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan terhadap fasilitas Pengadilan Negeri Sinjai dan melakukan penganiayaan terhadap petugas security yang berusaha mengamankan kejadian pada Pengadilan Negeri Sinjai	Jejaring PKY Sulsel	Oknum inisial I dan S	Pengadilan Negeri Sinjai
17	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan berbuat onar dan gaduh di PN Sleman yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara	Media Online (kedaulatan rakyat dan harian merapi)	Oknum keluarga korban	Pengadilan Negeri Sleman
18	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan fasilitas Pengadilan Agama Metro, berbuat onar di ruang sidang dan di ruang tunggu Pengadilan Agama Metro; serta memaki-	Media Online (radar 24 dan lampung newspaper)	Para pihak, inisial AM dan WS	Pengadilan Agama Metro

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	maki Hakim Pengadilan Agama Metro dengan kata-kata kotor.			
19	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan, serta mengancam keamanan hakim di luar persidangan dengan melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya	Hakim korban	Advokat inisial NWS	Pengadilan Negeri Pati
20	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait perbedaan penerapan aturan penegakan disiplin terhadap hakim militer	Hakim korban	-	-
21	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengganggu proses peradilan	Ketua PTUN Pekanbaru	Manajemen pusat perbelanjaan Panam Square	PTUN Pekanbaru

b) Pengukuran Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja di atas, maka secara garis besar capaian target kinerja untuk Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik berdasarkan Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Pengukuran Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	100%	Laporan masuk = 21 Laporan selesai ditangani = 21 Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah laporan masuk Tahun 2023}}{\text{Jumlah laporan yang ditangani Tahun 2023}} \times 100\%$ $21/21 \times 100\% = 100\%$ 21 laporan PMKH selesai ditangani dari 21 Laporan yang masuk (100%)

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik dan Advokasi khususnya dalam penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, memiliki capaian yang sama yaitu 100%, meskipun pada tahun 2022, jika dilihat dari kuantitas laporan yang masuk dan laporan yang ditangani yakni hanya 17 (tujuh belas) laporan. Kita lihat capaian kinerja pada tahun 2022 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian
Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat haki	100%	Laporan masuk = 17 Laporan selesai ditangani = 17 Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah laporan masuk Tahun 2022}}{\text{Jumlah laporan yang ditangani Tahun 2022}} \times 100\%$ 17/17x100% = 100% 17 laporan PMKH selesai ditangani dari 17 Laporan yang masuk (100%)

Sehingga kesimpulan bahwa selama dua tahun terakhir, capaian kinerja dari Sasaran Kinerja 2 : **Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik) selalu sesuai dengan target kinerja.** Perbandingannya antara tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH) Tahun 2022 dan 2023

Target 2020: laporan yang masuk 100% selesai ditangani	Capaian 2020: 12 laporan masuk, 12 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: 100%
Target 2021: laporan yang masuk 100% selesai ditangani	Capaian 2021: 13 laporan masuk, 13 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: 100%
Target 2022: laporan yang masuk 100% selesai ditangani	Capaian 2022: 17 laporan masuk, 17 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: 100%
Target 2023: laporan yang masuk 100% selesai ditangani	Capaian 2023: 21 laporan masuk, 21 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: 100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk meraih capaian kinerja sebagaimana digambarkan di atas, dimana capaian melebihi dari target, tidak lepas dari berbagai strategi yang diterapkan terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Pertama, adalah tantangan soal keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2023 jumlah SDM yang bertugas di bidang Advokasi Hakim hanya berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi gender 3 (tiga) wanita dan 2 (dua) pria. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang besar dikarenakan program kerja bidang Advokasi Hakim pun cukup banyak. Adapun strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan dan merevitalisasi peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial (selanjutnya disebut PKY) di daerah. Kedua, tidak dapat dipungkiri

bahwa tugas Advokasi Hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial belum terlalu dikenal di kalangan para hakim. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang berkembang bahwa Komisi Yudisial hanyalah pengawas hakim. Yang dalam kenyataannya banyak tugas-tugas lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, salah satunya adalah Advokasi Hakim. Adapun strategi yang terus dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai fungsi Advokasi Hakim ini diantaranya melalui program-program penunjang yang digulirkan oleh bidang Advokasi Hakim seperti diskusi publik para APH; dan program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi dengan perguruan tinggi yang memproduksi konten-konten di media sosial mengenai fungsi advokasi hakim dan ajakan untuk menjaga kehormatan hakim dan pengadilan; serta penyebaran informasi atau sosialisasi melalui kunjungan kerja. Selain itu publikasi melalui media sosial resmi Komisi Yudisial juga dilakukan, pada tahun 2023 misalnya Komisi Yudisial memproduksi beberapa konten-konten yang berkaitan dengan kehormatan hakim salah satunya adalah siniar (*podcast*) tentang kemuliaan hakim dari sudut pandang agama.

Tentu hal ini harus terus dilakukan agar informasi mengenai bahwa Komisi Yudisial juga memiliki fungsi mengadvokasi hakim semakin dikenal di kalangan hakim, masyarakat peradilan serta kalangan hukum lainnya. Sehingga kinerja bidang Advokasi Hakim bisa semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan dalam hal ini adalah hakim di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, sejak beberapa tahun lalu, bidang Advokasi Hakim secara masif memberikan peran yang penting kepada PKY dalam proses penanganan dugaan PMKH di wilayahnya. Dimulai sejak menerima laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan PMKH, kemudian melakukan telaah advokasi, melakukan penelusuran lapangan guna mengumpulkan data dukung, bahan, dan keterangan, menyusun laporan penanganan serta mempresentasikannya pada sidang pleno pengambilan keputusan. Hal ini dirasa menjadi solusi terbaik dalam menghadapi minimnya jumlah SDM di bidang Advokasi Hakim.

Kemudian, tingginya kasus dugaan PMKH yang ditangani oleh Komisi Yudisial juga sedikit banyak dipengaruhi oleh penambahan kantor PKY di 8 (delapan) wilayah pada tahun 2023 ini. Perlu diakui bahwa dengan adanya penambahan PKY, *awareness* mengenai dugaan PMKH semakin tinggi juga *screening* informasi lebih masif, sehingga menambah angka laporan/informasi mengenai dugaan PMKH yang masuk atau diterima oleh Komisi Yudisial.

Adapun strategi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah secara berkala melakukan peningkatan kapasitas SDM PKY khususnya dalam konteks bidang Advokasi Hakim atau penanganan dugaan PMKH kepada 8 (delapan) PKY baru. Hal ini agar banyaknya laporan/informasi yang masuk dapat diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu PMKH dan batasan-batasannya.

3) Sasaran Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

a) Capaian Kinerja

1) Penyelenggaraan Pelatihan

Pada tahun ini, telah diselenggarakan 4 (empat) jenis pelatihan, yakni Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH, Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial dan Pelatihan Tematik: Hukum Pertanahan, Pajak, Tindak Pidana Pemilu, serta Pelatihan KEPPH berdimensi aspek psikologi, yaitu: Pelatihan Pemantapan KEPPH, Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan masa kerja 8-15 Tahun dan Pelatihan “Peningkatan Kapasitas Hakim”.



Gambar 3.3 Peningkatan Kapasitas Hakim (Pelatihan Eksplorasi KEPPH) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial

Adapun pelatihan yang telah diselenggarakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Makassar, 21-24 Februari 2023.	50 hakim peradilan TUN dibawah yurisdiksi: PT TUN Manado, PT TUN Surabaya, dan PT TUN Mataram.	35 hakim peradilan TUN dibawah yurisdiksi: PT TUN Manado, PT TUN Surabaya, dan PT TUN Mataram.

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
2.	Pelatihan Pemantapan KEPPH. Bogor, 13-18 Maret 2023	50 hakim tk. 1, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat. 	49 hakim tk. 1, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 4 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat.
3.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun. Bogor, 8-12 Mei 2023	50 hakim tk. 1, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat. 	50 hakim tk. 1, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah PTA Banten, PTA Jawa Barat., PTA Jawa Tengah, PTA Jawa Timur dan PTA Lampung. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 10 hakim militer di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah.
5.	Pelatihan Tematik "Hukum Pajak" Bagi Hakim Pajak Jakarta, 25-27 Mei 2023	75 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.	73 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.
6.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Penanganan Laporan Masyarakat di KY. Pontianak, 5-9 Juni 2023.	50 hakim tingkat 1, dengan komposisi: 25 hakim peradilan umum dari wilayah Kalimantan Barat; 25 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Barat.	50 hakim tingkat 1, dengan komposisi: 25 hakim peradilan umum dari wilayah Kalimantan Barat; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Barat. 10 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
7.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim. Solo, 19-23 Juni 2023.	60 hakim tingkat 1, dengan komposisi: 20 hakim peradilan umum dari wilayah Jawa tengah; 15 hakim peradilan umum dari wilayah DI Yogyakarta; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Jawa Tengah; 10 hakim peradilan agama dari wilayah DI Yogyakarta.	60 hakim tingkat 1, dengan komposisi: 20 hakim peradilan umum dari wilayah Jawa tengah; 15 hakim peradilan umum dari wilayah DI Yogyakarta; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Jawa Tengah; 10 hakim peradilan agama dari wilayah DI Yogyakarta.
8.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berdimensi KEPPH. Surabaya, 31 Juli s.d. 5 Agustus 2023.	60 Hakim Pengadilan Umum Tk. 1 dari wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya.	60 Hakim Pengadilan Umum Tk. 1 dari wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya.
9.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi	60 Hakim Pengadilan Umum dan Agama Tk. 1 dari wilayah yurisdiksi PT Bandar Lampung,	60 Hakim tingkat pertama dari lingkungan peradilan

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
	Kasus Penanganan Laporan Masyarakat di KY. Lampung, 29 Agustus s.d. 1 September 2023.	PT Palembang, PTA Palembang, PTA Bandar Lampung.	umum dan agama, dengan rincian: 30 hakim agama: 3 hakim PTA Palembang, 27 hakim PTA Bandar Lampung. 30 hakim umum: 14 hakim PT Palembang, 16 hakim PT Bandar Lampung.
10.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim. Bekasi 13 s.d. 17 September 2023.	75 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.	73 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.
11.	Pelatihan tematik "Penyelesaian Tindak Pidana PEMILU/PILKADA"	Makassar, 24-27 Oktober 2023	50 hakim peradilan umum dari Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat: 49 Hakim Tk. 1 (41 Hakim Tk. 1 Sualwesi Selatan, 8 Hakim Tk. 1 Sulawesi Barat) 1 Hakim Tinggi PT Makassar.
12	Pelatihan Pelatihan tematik "Penyelesaian Tindak Pidana PEMILU/PILKADA"	Bogor, 21 – 24 November 2023	40 Hakim peradilan Umum dari Wilayah Jawa Barat dan Banten (2 Hakim Tinggi dan 38 Hakim PN)

Dari sisi kuantitas, adapun jumlah total hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2023 adalah sebanyak 600 (enam ratus) orang. Sehingga jika dilihat dari sejak peningkatan kapasitas hakim ini dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2012 telah ada 3.742 hakim yang dilatih oleh Komisi Yudisial, rinciannya adalah sebagai berikut

Tabel 3.16. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2023

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
2021	7	281
2022	11	600

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2023	12	600
Total	67	3.742

2) Pengukuran Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pelaksanaan Survei Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim khususnya pada semester 1 tahun 2023, yaitu:

1. Pelatihan Eksplorasi KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY yang dilaksanakan tanggal 21-24 Februari 2023 di Makassar.
2. Pelatihan Pemantapan KEPPH yang dilaksanakan tanggal 13-18 Maret 2023 di Bogor.
3. Pelatihan Pemaknaan KEPPH yang dilaksanakan tanggal 8-12 Mei 2023 di Bogor.
4. Pelatihan Tematik Hukum Pajak Berdimensi KEPPH bagi Hakim Pengadilan Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei di Bekasi,
5. Pelatihan Eksplorasi KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY yang dilaksanakan tanggal 5-6 Juni 2023 di Pontianak.
6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang dilaksanakan tanggal 19-23 Juni 2023 di Solo,
7. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berdimensi KEPPH Kerjasama KY dan MA yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2023 s.d. 5 Agustus 2023 di Surabaya.

Sepanjang November sampai dengan Desember 2023 telah dilaksanakan survey pengukuran dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim terhadap 224 (dua ratus dua puluh empat) hakim alumni kegiatan peningkatan kapasitas hakim Komisi Yudisial yang mendapatkan pelatihan sepanjang Januari s.d. September 2023, dengan jumlah responden sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) yang merupakan atasan dan rekan sejawat dari hakim yang diukur.

Adapun beberapa kesimpulan dari hasil pengolahan data survei pengukuran dampak pelatihan PKH adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2023 berdampak sangat baik;
2. Meskipun berdampak sangat baik, masih terbuka ruang peningkatan dampak untuk perilaku hakim khususnya yang mendapatkan skor yang rendah dibandingkan perilaku yang lain;
3. Peningkatan dampak dapat diprioritaskan pada butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) untuk prinsip berintegritas tinggi; berdisiplin tinggi; dan bersikap profesional.

Rekomendasi dari hasil survei pengukuran dampak pelatihan PKH adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pengukuran perlu disempurnakan dengan menambah rentang penilaian dari 1-4 menjadi 1-6 atau 1-8;
2. Redaksional kuesioner perlu disederhanakan untuk memudahkan enumerator dan responden;
3. Perlu ditegaskan predikat atas skor survei hasil pengukuran dampak peningkatan kapasitas hakim;
4. Prioritas penguatan peningkatan kapasitas hakim dapat dilakukan terhadap prinsip berintegritas tinggi; berdisiplin tinggi; dan bersikap profesional.

b) Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran keluaran "Meningkatnya Kapasitas dan Etika", Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki 2 (dua) indikator yaitu : (1). Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim dengan target 30%; dan (2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH dengan target sebesar 90%. Sebagaimana capaian kinerja yang dijelaskan sebelumnya maka pengukuran terhadap kinerja Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim
Pengukuran kinerja indikator ini adalah melihat berapa persentase hakim yang telah diberikan peningkatan kapasitas oleh Komisi Yudisial yang dihitung dari jumlah seluruh hakim yang ada. Namun, sebelumnya, perlu disampaikan pula bahwa pada tahun 2023, terdapat penambahan jumlah hakim sebagai imbas dari rekrutmen hakim yang sebelumnya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, sehingga terdapat perbedaan perhitungan dengan tahun sebelumnya khususnya pada angka pembagi.

Pada tahun 2022, jumlah hakim adalah 7.943 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga) sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 8.391 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hakim. Adapun pengukuran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2023

Target Capaian Tahun 2023	Formulasi Hitung Tahun 2023	Capaian	Persentase Capaian Kinerja
30% Jumlah Hakim : 8.391	(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100%	Capaian 2012-2023 : 3.742 hakim Pengukuran : $\frac{3.742}{8.391} \times 100\% = 44.59\%$	148,63%
*terdapat penambahan jumlah hakim, sehingga angka pembaginya berbeda, jika diukur dengan jumlah total hakim yang sama dengan tahun 2022, maka persentasenya adalah 47,11%			

Sedangkan jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 2020 s.d 2023, capaian kinerja untuk indikator jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Persentase Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2020-2023

Tahun	Target Capaian	Formulasi Hitung	Capaian	Persentase Capaian Kinerja
2020	15% <i>Jumlah Hakim: 8595 (*data Laptah MA 2020)</i>	(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100%	Capaian 2012-2020 : 2.262 hakim Pengukuran : $\frac{2.263}{8.595} \times 100\% = 26,32\%$	175,4%
2021	22% <i>Jumlah Hakim: 8.391 (*data Laptah MA 2021)</i>		Capaian 2012-2020 : 2.542 hakim Pengukuran : $\frac{2.542}{8.391} \times 100\% = 30,29\%$	137,6%
2022	25% <i>Jumlah Hakim : 7.943</i>		Capaian 2012-2022 : 3.142 hakim Pengukuran : $\frac{3.142}{7.943} \times 100\% = 39,55\%$	158,2 %
2023	30% <i>Jumlah Hakim : 8.391</i>		Capaian 2012-2023 : 3.742 hakim Pengukuran : $\frac{3.742}{8.391} \times 100\% = 44,59\%$	148,63%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian sejak tahun 2020 hingga 2022 yang selalu melebihi target merupakan komitmen Komisi Yudisial untuk dapat melibatkan lebih banyak hakim dalam pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Perubahan jumlah hakim, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh bidang peningkatan kapasitas hakim dengan melihat bahwa hal tersebut sebagai peluang yang kemudian membuat Komisi Yudisial harus bekerja keras untuk memenuhi persentase hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas tanpa melupakan esensi atau kualitas pelatihan itu sendiri.

2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH

Hakim yang berkarakter KEPPH sebagai dampak dari peningkatan kapasitas hakim (PKH) diukur melalui survei rekan sejawat dan/atau atasan, yang mengobservasi perilaku hakim peserta pelatihan dan/atau PKH sedikitnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan mengikuti

pelatihan. Karakter KEPPH tercermin dari penerapan butir-butir KEPPH yang menjadi materi dari pelatihan oleh hakim peserta pelatihan dan/atau PKH. Hakim peserta pelatihan dan/atau PKH dapat dikualifikasi berkarakter KEPPH, apabila yang bersangkutan mendapatkan hasil pengukuran di atas 80%. Artinya, **lebih dari 80% perilakunya dianggap menerapkan butir-butir KEPPH yang menjadi materi pelatihan dan/atau PKH.**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sepanjang November sampai dengan Desember 2023 telah dilaksanakan survey pengukuran dampak keberhasilan peningkatan kapasitas hakim terhadap 224 (dua ratus dua puluh empat) hakim alumni kegiatan peningkatan kapasitas hakim Komisi Yudisial yang mendapatkan pelatihan sepanjang Januari s.d. September 2023, dengan jumlah responden sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) yang merupakan atasan dan rekan sejawat dari hakim yang diukur. Adapun hasil pengolahan survei tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19. Hasil Pengolahan Survei Dampak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023

No.	Aspek Pengukuran	Skor 1-4	Skor 1-100
1.	Berlaku Adil	3.902	97.56
2.	Berperilaku Jujur	3.927	98.18
3.	Berperilaku Arif dan Bijaksana	3.910	97.75
4.	Bersikap Mandiri	3.908	97.71
5.	Berintegritas Tinggi	3.867	96.66
6.	Bertanggung Jawab	3.924	98.10
7.	Menanjung Tinggi Harga Diri	3.914	97.85
8.	Berdisiplin Tinggi	3.865	96.70
9.	Berpendala Rendah Hati	3.873	96.82
10.	Bersikap Profesional	3.869	96.72
	Rata-Rata	3.888	97.19

Berdasarkan hasil penghitungan dari aspek perilaku hakim yang menjadi sampel pengukuran, maka rata-rata hasil survey dampak PKH adalah: **97,19% perilaku dari peserta pelatihan yang diukur dampaknya telah sesuai dengan karakter KEPPH.** Sedangkan apabila dilihat dari aspek individu hakim yang menjadi sampel pengukuran, maka diperoleh hasil penghitungan **99,11% hakim peserta pelatihan/PKH sesuai dengan karakter KEPPH.** Penghitungan ini dihasilkan dari rasio antara 222 (dua ratus dua puluh dua) hakim peserta pelatihan/PKH yang memenuhi

kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%) dengan 224 (dua ratus dua puluh empat) hakim peserta pelatihan yang menjadi sample pengukuran.

Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022, telah dilakukan pengukuran terhadap sampling 96 hakim yang telah dilatih oleh Komisi Yudisial di tahun 2022 yang bertugas di 4 badan peradilan (Balikpapan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Manado, Medan, Nusa Tenggara Timur, Riau). Sampling tersebut diambil dari 20% dari populasi jumlah hakim yang mengikuti pelatihan Eksplorasi sebanyak 472 hakim, dengan hasil rata-rata skor setelah pelatihan sebesar 117,37 (97,81%).

Kemudian jika dilihat secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 hingga 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 s.d 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Capaian			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kapasitas dan etika hakim.	1.Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	15	22	25%	30%	26,32%	30,29%	39,55%	44,59%
	2.Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	75%	80	85%	90%	-	98,5%	97,81%	97,19%
	Persentase Capaian Kinerja	2020	2021	2022	2023				
	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim.	175,4%	137,6%	158,2%	148,63%				
	Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH.	-	123,1%	115,1%	107,98%				

c) Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari capaian sebagaimana yang tertera pada tabel di atas, terdapat beberapa penyebab keberhasilan, diantaranya :

- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya :
 - Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

(Balitbangdiklatkumdil) dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim pengadilan Hubungan Industrial.

2. Pelatihan yg diselenggarakan oleh KY berdimensi KEPPH sehingga berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Dimensi KEPPH fokus pada internalisasi nilai2 KEPPH kepada hakim dan pemahaman perihal laporan2 pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat ke KY;
3. Tema dan materi pelatihan sesuai isu hukum terkini dan sesuai dengan kebutuhan hakim;

C. REALISASI ANGGARAN

Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilakukan, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim mencapai realisasi anggaran pada angka 98.07% dari pagu sebesar Rp. 18.664.584.000,- (delapan belas milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21 Tabel Realisasi Anggaran Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	18.664.584.000	0	15.322.795.511	2.981.628.510	18.304.425.021	98.07 %	360.158.979
BH Program Penegakan Integritas Hakim	18.664.584.000	0	15.322.795.511	2.981.628.510	18.304.425.021	98.07 %	360.158.979
BH 3B/2 Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.664.584.000	0	15.322.795.511	2.981.628.510	18.304.425.021	98.07 %	360.158.979
ADG Standarisasi Proses dan SDM	5.100.020.000	0	4.890.175.364	191.638.200	5.081.813.564	99.64 %	18.205.436
ADG.001 Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	110.577.000	0	9.679.500	100.000.000	109.767.000	99.27 %	809.500
ADG.002 Takwil Pool Calon Hakim Agung	58.865.000	0	1.800.000	48.465.000	50.265.000	91.28 %	8.600.000
ADG.003 Laporan hasil Seleksi Administrasi	232.550.000	0	231.647.447	34.000	231.681.447	99.62 %	878.553
ADG.004 Standarisasi Calon Hakim Agung (Ad Hoc di MA)	4.068.019.000	0	4.947.049.417	3.070.000	4.950.119.417	99.83 %	7.000.283
PDG Standarisasi Proses dan SDM	9.200.000.000	0	6.735.289.668	1.194.001.770	7.932.290.458	96.74 %	287.709.544
PDG.001 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KLPPI) serta teknis hukum dan peradilan	9.200.000.000	0	6.735.289.668	1.194.001.770	7.932.290.458	96.74 %	287.709.544
PLA Koordinasi	5.364.584.000	0	3.894.332.461	1.595.993.540	5.290.321.001	96.62 %	74.242.999
PEA.001 Advokasi Hakim dan Klinik Etik	5.364.584.000	0	3.894.332.461	1.595.993.540	5.290.321.001	96.62 %	74.242.999

BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2023, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah memenuhi dan dalam beberapa sasaran melebihi target kinerja sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Uraian kesimpulan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.1. Tabel Simpulan Capaian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2023

No	Bidang	Uraian Kesimpulan	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja
1.	Rekrutmen Hakim	Terselenggaranya Seleksi CHA dan Cakim <i>Ad hoc</i> di MA Tahun 2022/2023 menghasilkan 9 calon yang memenuhi standar kelayakan yang kemudian diusulkan ke DPR untuk mengisi kekosongan 11 Hakim Agung dan 3 Hakim <i>Ad hoc</i> HAM di MA. Namun anggaran yang terserap tidak sebanding dengan output yang dicapai dikarenakan seleksi yang dilakukan merupakan kelanjutan dari seleksi tahun 2022. Terselenggaranya Seleksi CHA dan Cakim <i>Ad hoc</i> di MA Tahun 2023 menghasilkan 11 calon yang memenuhi standar kelayakan yang kemudian diusulkan ke DPR untuk mengisi kekosongan 10 Hakim Agung dan 3 Hakim <i>Ad hoc</i> HAM di MA.	99,64%	74,07% (20 calon yang diusulkan ke DPR dari kebutuhan 27 hakim agung dan <i>ad hoc</i> di MA)
2.	Advokasi	Terselesaikannya sejumlah 21 (dua puluh satu) laporan kegiatan penanganan PMKH terhadap hakim dari 21 (dua puluh satu) laporan yang masuk ke Komisi Yudisial.	98,62%	100% (21 laporan yang ditangani dari 21 laporan yang masuk)
3.	Peningkatan Kapasitas Hakim	3.742 hakim telah mendapatkan peningkatan kapasitas oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2012 dari 8.391 hakim.	96,74%	44,59% (dari target 30%)
		Presentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH berdasarkan hasil survey dan pengukuran mencapai 97,19%		107,98% (97,19% dari target 90%)

Kemudian, sebagai refleksi dari pencapaian kinerja pada tahun 2023, strategi atau langkah yang akan dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan organisasi untuk mencapai kinerja diantaranya adalah :

1. Bidang Rekrutmen Hakim

- Memperkuat kolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk mengetahui kebutuhan aktual serta mendapatkan masukan perbaikan proses dan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung;

- Dari sisi internal, perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. selain itu juga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi, dan pelayanan rekrutmen hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung.

2. Bidang Advokasi Hakim

- Optimalisasi penyebarluasan fungsi advokasi hakim melalui berbagai program serta konten-konten yang diproduksi;
- Melakukan advokasi kebijakan berkaitan dengan penerapan sistem keamanan persidangan dan pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan serta hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Misalnya adalah dengan memperkuat forum komunikasi keamanan pengadilan di setiap pengadilan tingkat pertama, menggagas konsep sumber daya pengamanan mandiri pada badan peradilan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sistem keamanan persidangan serta menggagas penyusunan modul dalam memitigasi kerawanan keamanan persidangan;
- Melibatkan *stakeholder* seperti perguruan tinggi untuk turut serta membudayakan penghormatan kepada profesi hakim dan institusi pengadilan sebagai *the last resort* penegakan hukum di Indonesia; dan
- Memperkuat kerjasama dan sinergisitas dengan aparaturnya penegak hukum (APH) untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi hakim.

3. Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim

- Memperbaiki aplikasi data hakim peserta pelatihan untuk digunakan sebagai usulan/rekomendasi peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan jenis pelatihan;
- Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk mengetahui pelatihan yang dibutuhkan oleh hakim, dan dapat mengusulkan peserta pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan;
- Menyusun desain peningkatan kapasitas hakim berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan hakim, baik itu desain umumnya maupun desain teknisnya;
- Membangun LMS (*Learning Management System*) Peningkatan Kapasitas Hakim untuk memudahkan pembelajaran pelatihan baik secara tatap muka maupun secara daring dan dapat menjangkau hakim di seluruh Indonesia;

- Mengoptimalkan tugas kesejahteraan hakim dengan koordinasi MA perihal kebutuhan kesejahteraan hakim, menyelesaikan desain kesejahteraan hakim, dan strategis pengupayaan pemenuhan kesejahteraan hakim.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Jakarta, 15 Januari 2024
KEPALA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN
PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM



Untung Maha Gunadi
NIP 19710422 199203 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,

Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Sasaran Program:

Memperkuat Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	65%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	35%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	90%

Kegiatan:

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi
dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

Anggaran:


Rp18.664.584.000,00

Rp1.049.876.000,00

Sekretaris Jenderal,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023
Biro Rekrutmen, Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim,


Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si
NIP 19710422 199203 1 001



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id